



Telantar karena Salah Urus

JOGJA—Sejumlah bangunan bernilai miliaran rupiah milik pemerintah yang tersebar di kabupaten dan kota di DIY terbengkalai. Salah urus, perubahan struktur birokrasi, dan letak yang kurang strategis dianggap sebagai penyebab masalah tersebut.

Bhekti Suryani, Rima Sekarani I. N, & Arief Junianto
redaksi@harianjogja.com

Ratusan kios di Terminal Giwangan Kota Jogja kini telantar. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan Bekti Zunanta mengakui ada lebih dari 200 kios di terminal Tipe A itu yang tak dipakai, terutama di lantai dua.



<https://goo.gl/oaR3C8>

► Peralihan tanggung jawab pengelolaan mengakibatkan sejumlah bangunan terkatung-katung.

► Beberapa proyek gagal menggairahkan perekonomian.

Menurut dia sengketa pembangunan Terminal Giwangan antara Pemkot Jogja dengan pengembang PT Perwita Karya menyebabkan proyek pemerintah yang sudah berumur 13 tahun itu tidak terurus. Sementara, UPT Terminal Giwangan hanya menangani masalah pengelolaan atau kegiatan operasional

terminal. "Seperti mencatat bus masuk bus keluar," ucap Bekti, Minggu (26/2)

Seiring waktu, bangunan kios terminal makin lapuk dan tak diurus. "Sebagian atapnya bocor, ada yang rusak. Tidak diperbaiki," kata dia.

● Lebih Lengkap Halaman 8

ASET YANG TAK BERJALAN SESUAI RENCANA

Miliaran rupiah digelontorkan saat pemerintah membangun sejumlah aset. Namun, prasarana itu tak berjalan sesuai rencana

■ Sebanyak 200 kios di Terminal Giwangan kosong. Beberapa bagian bangunan sudah rusak. Aktivitas di *stamplat* yang kurang ramai diduga menjadi penyebab melomponnya kios-kios itu.

JOGJA

KULONPROGO

■ Kulonprogo Fish Center (KFC) di Wates selesai dibangun pada 2007 dan mulai tak terurus pada 2009.

■ Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo di Sentolo nyaris mati suri.

BANTUL

■ Pasar Seni Gabusan tak optimal menjadi ruang pameran beragam produk kerajinan. Pemkab Bantul berencana mengubahnya menjadi pusat kebudayaan.

■ Wahana Kolam Renang Anak di Parangtritis Baru berubah jadi kolam ikan.

■ Panggung Terbuka di Desa Wisata Srikemenut Dusun Kedungmiri, Desa Sriharjo, Imogiri, ditumbuhi ilalang dan lumut.

GUNUNGKIDUL

■ Perumahan gelandangan dan pengemis di Dusun Doga, Nglangeran, Patuk, berubah fungsi. Belum jelas pengelolaan selanjutnya.

■ Rumah Susun Sewa Sederhana Karangrejek, Wonosari, masih proses lelang penghuni.

SLEMAN

■ Taman Kuliner Condongcatur kurang ramai. Pemerintah mulai sering mengadakan acara untuk menyemarakkan lokasi tersebut.

Sumber: Wawancara (BES, RIS, ARI, DAK, HAR)

Telantar karena...

Persaingan jadi pelek karena perubahan struktur birokrasi. UPT Terminal Giwangan tidak bisa ikut campur mengelola dan memelihara kios karena instansi itu sudah berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, tidak lagi di Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

Atali lalu perkembangan masyarakat juga mengakibatkan ratusan kios itu terlunta-lunta. Potensi berbisnis di Terminal Giwangan dianggap kurang menguntungkan karena aktivitas di stamplat semakin sepi.

Pada hal, harga sewa per kios, menurut Bekti, masih terjangkau untuk kelas Terminal Tipe A, yaitu mulai dari Rp180.000 hingga Rp850.000 per bulan.

Sengketa pengelolaan aset Terminal Giwangan bermula pada 2004 lalu, saat PT. Perwita Karya membangun terminal tersebut. Investasi pembangunan terminal Tipe A itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 30 tahun.

Namun pada 2009 ketika terminal baru berumur lima tahun, Pemkot Jogja mengambil alih dan memutuskan kontrak dengan PT. Perwita Karya dengan alasan perusahaan tidak mampu membiayai fasilitas perbekalaan di terminal.

PT. Perwita Karya menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jogja pada 2010 dan menang. Pemkot Jogja wajib membayar Rp56 miliar. Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan akhirnya hanya diminta membayar Rp41 miliar sebagai hukuman pemutusan kontrak sepihak.

Tidak sampai di situ, PT. Perwita Karya mengajukan lagi kasus ke Mahkamah Agung (MA) dan berhasil memenangkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemkot mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA namun ditolak. Kini, Pemkot harus membayar senilai Rp56 miliar kepada PT Perwita Karya atas pembangunan proyek yang kini justru tidak produktif tersebut.

Pergeseran dalam sistem birokrasi juga menghambat mekarnya infrastruktur di Kulonprogo. Salah satu bangunan yang mangkrak selama bertahun-tahun adalah Kulonprogo Fish Center (KFC) di Wates. KFC selesai dibangun pada 2007 dan mulai tak terurus pada 2009 lalu.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro, mengatakan pengelolaan KFC tidak berjalan sesuai harapan karena sistem manajemen yang buruk. "Manajemennya memang perlu ditata kembali," ujar Astungkoro, Jumat (24/2).

KFC awalnya menjadi kewenangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Perindagkopan) Kulonprogo. Namun, instansi itu berubah nama dan sistem. Akibatnya, kewajiban pengelolaan KFC jadi tidak jelas. Perkara itu kemudian mendapatkan solusi pada akhir 2016 kemarin. KFC diputuskan menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo. Pengelolannya bakal melibatkan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Astungkoro lalu menegaskan KFC harus bisa beroperasi secara aktif pada 2017 ini demi menggerakkan perdagangan ikan.

Bangunan lain belum jelas nasib ke depannya, misalnya Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo di Sentolo. Setelah diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo pada 2013 lalu, pasar tersebut nyaris mati suri. Selain sepi pengunjung, hanya ada sedikit kios yang masih bertahan. Padahal, lokasinya cukup strategis, yaitu di wilayah kecamatan Sentolo dan tidak jauh dari Jembatan Kali Progo.

Sampai sekarang, konsep untuk merevitalisasi pasar yang lesu itu masih remang-remang. Kepala Dinas Perdagangan Kulonprogo, Nikiro Probo Laras mengatakan, belum ada strategi khusus untuk mempromosikan Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo. Alokasi anggaran daerah cenderung diprioritaskan untuk program revitalisasi pasar tradisional.

Mubazir

Di Bantul, pembebasan lahan Pasar Seni Gabusan (PSG) di Desa Timbulharjo, Sewon senilai lebih dari Rp29 miliar belum menemui titik terang. Pengambilalihan tanah kas desa sewa empat hektare itu disalurkan Pemkab Bantul sejak era kepemimpinan Bupati Suharsono. Bupati berniat menyulap kawasan yang semula dibangun sebagai galeri produk kerajinan lokal Bantul itu menjadi sebuah pusat kebudayaan.

"Nanti Pasar Seni Gabusan itu akan berubah menjadi Balai Budaya yang tak lagi dikelola oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, tetapi oleh Dinas Kebudayaan," kata Kepala Bappeda Bantul Fenti Yusdayati.

Pemkab Bantul berniat membeli lahan itu dari Pemerintah Desa Timbulharjo menggunakan Dana Keistimewaan 2017.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sulistyanto menjelaskan sejak awal

pihaknya mengonsep PSG berbeda dari pasar pada umumnya. PSG ditugaskan sebagai *showroom*. "Dengan begitu, kami memang tak menuntut retribusi dari para," ucapnya.

Sejumlah aset pemerintah juga mubazir. Misalnya Wahana Kolam Renang Anak di Parangtritis Baru, di RT 3 Dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kretek. Arena bermain senilai Rp200 juta itu bahkan sudah mangkrak sejak awal dibangun sekitar 2014 lalu. Warga sekitar malah memanfaatkannya sebagai kolam ikan. "Kami taburi benih ikan lele saja. Daripada mangkrak. Lihat saja, barang-barang elektronik di sana sudah banyak yang hilang," ujar Ketua RT 3 Tri Widodo.

Belum lagi sejumlah aset yang merupakan limbah dari Penda DIY seperti Panggung Terbuka senilai Rp400 juta di Desa Wisata Srikemenut Dusun Kedungmiri, Desa Sriharjo, Imogiri. Lagi-lagi, peralihan kewenangan malah bikin bangunan itu mandul. Aset yang sudah diserahkan kepada dusun sejak 2015 lalu tak terawat. Ilalang dan lumut tumbuh di mana-mana.

"Kalau memang aset itu sudah diserahkan kepada desa, kami bisa apa. Kami hanya bisa membina desa wisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Bantul Supriyanto.

Di Gunungkidul, beberapa aset milik pemerintah juga tidak berfungsi, meliputi perumahan gelandangan pengemis (gepeng) di Dusun Doga, Nglangeran, Patuk; Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Karangrejek, Wonosari; hingga pembangunan pasar di Desa Gari, Wonosari dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk reklamasi pascatambang. "Belum bisa dibuang mangkrak karena proses masih jalan terus," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Syarif Amunanto, Jumat.

Rusunawa belum bisa dimanfaatkan karena belum ada serah terima dari Pemerintah Pusat ke Pemkab. "Saat ini masih dalam proses seleksi untuk calon penghuni," ungkapnya.

Sementara itu, permukiman gepeng di Nglangeran, menjadi wewenang Pemerintah DIY selaku pemilik program. Fungsi permukiman itu juga berubah. "Perumahan itu tidak jadi untuk gepeng. Kami tidak tahu program barunya seperti apa karena itu menjadi hak Dinas Sosial DIY," kata dia. (David Kurniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005